



Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia

The Influence of Foreign Investment, Corruption Perception Index, Poverty, Unemployment and Minimum Wage on Income Inequality in Indonesia

Kasman Karimi¹, Pertiwi Mulyani², Neng Murialti³, Tibrani⁴

^{1,2}Universitas Bung Hatta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Padang

³Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pekanbaru

⁴Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pekanbaru

Email: kasman_karimi@yahoo.com

Article Info

Article history:

Received: 28 Maret 2023

Accepted: 18 Juni 2023

Published: 30 Juni 2023

Keywords:

income inequality, foreign investment, corruption perceptions index, poverty, unemployment, minimum wage

DOI:10.37859/jae.v13i1.4775

JEL Classification:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang bersumber dari kantor Badan Pusat Statistik, *Web World Bank* dan *Transparency Internasional*. Metode analisis data yang digunakan adalah data Regresi Linier Berganda (time series) di Indonesia selama 25 tahun dari tahun 1997 sampai 2021. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran, dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

This study aims to analyze the influence directly or indirectly of Foreign Investment, Corruption Perception Index, Poverty, Unemployment and Minimum Wage on Income Inequality in Indonesia. The data used in this study is a secondary type of data sourced from the offices of the Central Statistics Agency, the World Bank Web and Transparency International. The data analysis method used is Multiple Linear Regression data (time series) in Indonesia for 25 years from 1997 to 2021. Based on the results of the analysis, it is known that Foreign Investment, Corruption Perception Index, Poverty, Unemployment, and Minimum Wage have a significant effect on Income Inequality in Indonesia.

PENDAHULUAN

Beragam upaya dilakukan negara di dunia untuk bisa meningkatkan kondisi perekonomiannya sehingga dapat mensejahterakan seluruh rakyatnya. Kaum sosialis menganggap dominasi pemerintah dalam perekonomian dan meminimalisasi hak kepemilikan harta masyarakat adalah cara yang paling tepat untuk mengoptimalkan perekonomian dan kesejahteraan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Whittaker bahwa sistem ekonomi sosialis menunjukkan sistem-sistem kepemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber produksi (selain labor) secara kolektif. Sosialis bisa mencakup asosiasi kooperatif maupun kepemilikan dan pengoperasian oleh pemerintah (Deliarnov, 2012).

Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan ketebatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan pendapatan daerah semakin melebur.

Sementara Adam Smith, pencetus sistem ekonomi liberalis memiliki pendapat yang berlawanan dengan sistem ekonomi sosialis. Menurut Smith, Negara sama sekali tidak boleh mengatur perekonomian, melainkan menyerahkan segala sesuatunya pada *invisible hand*. Dalam sistem ekonomi liberalis, tiap individu diberikan keleluasan yang besar dalam perekonomian. Paham liberalis tersebut di dasarkan pada pemikiran Smith, Deliarnov bahwa walaupun setiap orang didorong untuk mengejar kepentingannya masing-masing, namun adanya persaingan bebas menjamin masyarakat secara keseluruhan akan menerima benefit sehingga akan tercapailah kesejahteraan umum (*General welfare*). (Deliarnov, 2012)

Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia tertinggal jauh dari negara lain dalam hal penanaman modal asing langsung (FDI). Masuknya FDI sangat penting untuk integrasi ekonomi internasional karena menciptakan hubungan yang stabil antara lingkungan ekonomi negara. Dalam penelitiannya, menemukan (Pourfaraj et al., 2019) yang menemukan bahwa FDI tidak mempengaruhi ketimpangan.

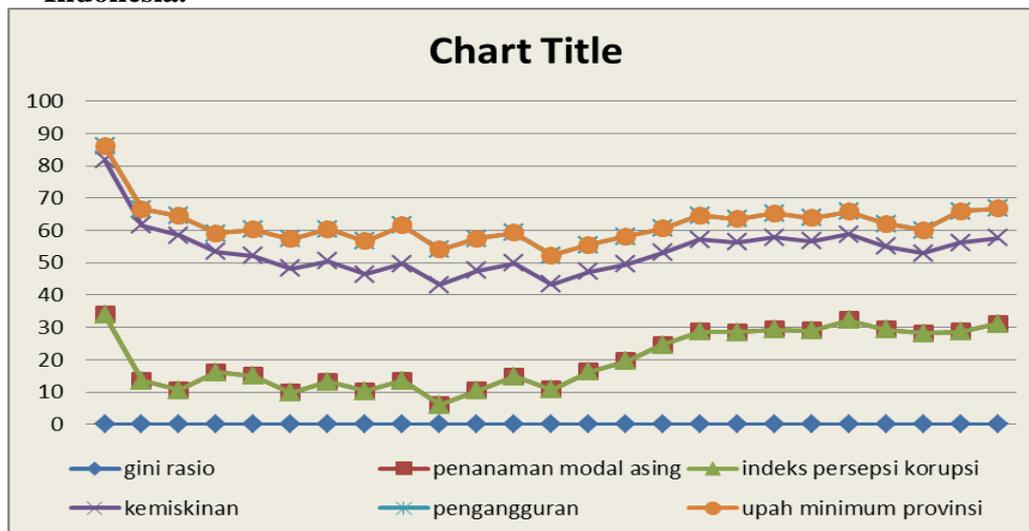
Ketidak stabilan politik salah satunya dapat terjadi dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atau penyalahgunaan jabatan politik. Pelanggaran atau penyalahgunaan politik yang paling sering terjadi dan kemudian menjadi fenomena umum di banyak negara adalah korupsi. Korupsi memang selalu menjadi isu hangat dalam penyelenggaraan pemerintah. Secara mendunia, korupsi sudah disepakati sebagai tindak pidana yang menjadi musuh dan penyakit bagi seluruh bangsa di seluruh negara di dunia. Korupsi tidak mengenal negara maju maupun negara miskin, karena korupsi sudah tumbuh dan mengakar bahkan menjadi budaya hampir di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin (Andiny & Mandasari, 2017).

Masalah ketimpangan akan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia karena mereka yang kaya akan cenderung semakin kaya dan mereka yang miskin akan cenderung semakin miskin. Adanya perbedaan pendapatan yang ekstrim ini membuat masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dapat dikatakan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan distribusi pendapatan, karena semakin ada jarak antara individu kaya dengan individu miskin dan mereka masyarakat miskin akan semakin kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akan lebih mudah untuk masuk kedalam garis kemiskinan (Dias Widya Ningtyas, 2017).

Selain kemiskinan, tingkat pengangguran juga mempunyai peran penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Peningkatan pengangguran memiliki dampak yang memberatkan pada ketimpangan pendapatan (Cysne & Turchick, 2012) Oleh sebab itu, dengan mengurangi pengangguran, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat dikurangi.

Upah minimum telah diyakini sebagai alat yang efektif untuk menekan kesenjangan pendapatan. Sebagai sebuah kebijakan lembaga, upah minimum tidak hanya menjadi batas minimum upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi kenaikan pendapatan dan memiliki dampak penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Sari Nurmalisa Sungkar; dkk, 2015).

Tabel 1. Data Ketimpangan Pendapatan, Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi di Indonesia.



Tabel diatas menunjukkan Gini rasio tercatat sebesar 0.386 pada tahun 2016, lalu turun menjadi 0.381 pada tahun 2017, turun kembali menjadi 0.378 pada tahun 2018. Kemudian, gini rasio pada tahun 2019 sebesar 0.37 dan naik lagi menjadi 0.373 pada tahun 2021. Semakin tinggi kesenjangan pendapatan akan memperbesar terjadinya masalah sosial. Ketidak seimbangan sosial akan menyebabkan ketidak stabilan ekonomi.

Pada tabel diatas terlihat perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia tahun 2016-2021 mengalami naik turun mulai dari tahun 2016 sebesar 28964.1 Juta US\$ meningkat sampai tahun 2017 sebesar 32239.8 Juta US\$ dan mengalami penurunan sampai tahun 2021 sebesar 31093.1 Juta US\$. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin tinggi penanaman modal asing di indonesia maka semakin tinggi pendapatan negara melalui pajak, Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara.

Terlihat perkembangan indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2016 - 2021 rata-rata mengalami naik turun tetapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 angka IPK tinggi sebesar 0.38 yang artinya tingkat IPK pada tahun ini termasuk ke skala rendah dan pada tahun 2021 angka IPK rendah sebesar 0.38 yang artinya tingkat IPK pada tahun ini termasuk ke skala tinggi. Tinggi nya tingkat skala korupsi maka akan mengakibatkan menurunnya tingkat investasi, menciptakan sistem kelembagaan yang buruk, meningkatkan kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Pada tabel di atas dapat dilihat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2016 yaitu 27.76 jiwa kemudian menurun sampai tahun 2019 yaitu 24.78 jiwa tetapi pada tahun 2020 dan 2021 kemiskinan di indonesia kembali tinggi yaitu 26.50 jiwa. Pada saat jumlah penduduk miskin meningkat ini akan menyebabkan jumlah pengangguran akan meningkat, tingkat kematian meningkat, tingkat pendidikan akan rendah serta tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin meningkat jumlah kemiskinan akan semakin rendah pula ketimpangan pendapatan di negara indonesia.

Perkembangan pengangguran di Indonesia tahun 2016 - 2021 mengalami naik turun, pada tahun 2016 sebesar 7.032 ribu orang menurun sampai tahun 2019 sebesar 7.104 ribu

orang dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 9.102 Dengan demikian dapat disimpulkan semakin tinggi angka pengangguran maka akan menyebabkan tinggi nya ketimpangan pendapatan di Indonesia, ini menandakan penyerapan tenaga kerja di Indonesia tidak maksimal karena jumlah lapangan kerja yang tersedia kalah banyak dari jumlah tenaga kerja.

Angka ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum diikuti oleh tren peningkatan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pada tahun 2016 rata-rata upah minimum mulai tumbuh. Dari Rp. 1.997.819 pada tahun 2010, meningkat setiap tahun dan mencapai Rp. 2.687.724 pada tahun 2021. Di sisi lain indeks ketimpangan pendapatan telah tumbuh dari 30% di tahun 2016 menjadi 41% pada tahun 2021, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami penurunan atau menjadi kurang merata.

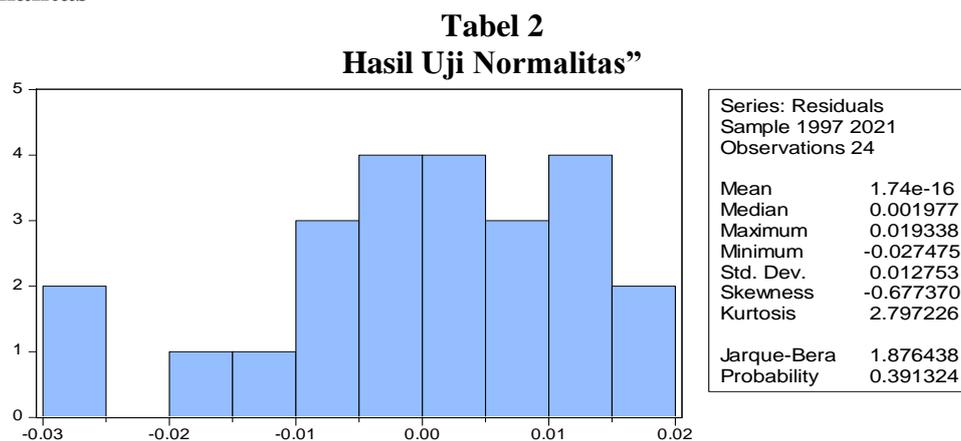
METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang bersumber dari kantor Badan Pusat Statistik, *Web World Bank* dan *Transparency Internasional*. Metode analisis data yang digunakan adalah data Regresi Linier Berganda (*time series*) di Indonesia selama 25 tahun dari tahun 1997 sampai 2021. Variabel yang digunakan adalah Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Pengangguran, Upah Minimum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2022

Uji normalitas diatas menunjukkan bahwa nilai probability 0.391324 akan dibandingkan dengan $\alpha = 0.05$. Jadi $0.391324 > 0.05$ maka dengan ini H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil pengolahan data dalam riset ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). “Uji multikolinieritas yang di gunakan dalam riset ini adalah menggunakan matrix correlation. Jika korelasi yang terjadi diatas 0.80, maka terdapat masalah multikolinieritas model yang baik seharusnya tidak terdapat masalah multikolinieritas” (Gujarati ,2006).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Correlation						
	KP	PMA	IPK	KM	PG	UMP
KP	1.000000	0.697058	0.568495	-0.181342	-0.322564	0.296490
PMA	0.697058	1.000000	0.827350	-0.552149	-0.448585	0.728303
IPK	0.568495	0.827350	1.000000	-0.820562	-0.065769	0.929508
KM	-0.181342	-0.552149	-0.820562	1.000000	-0.277755	-0.847065
PG	-0.322564	-0.448585	-0.065769	-0.277755	1.000000	0.088205
UMP	0.296490	0.728303	0.929508	-0.847065	0.088205	1.000000

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2022

Hasil pengujian multikolenieritas dalam riset ini diketahui model mengandung multikolenieritas karena terdapat nilai koefisien variable $> 0,80$ dimana variable yang berkorelasi tersebut adalah Penanaman modal asing (X1), Indek Persepsi Korupsi /IPK (X3) dan Upah minimum Provinsi/UMP (X5). Maka keputusannya H_0 diterima dan H_a di tolak maka disimpulkan model mengandung gejala multikolenieritas. Salah satu cara perbaikan masalah multikolinieritas adalah melalui transformasi variabel dalam bentuk *first difference* atau delta.

Uji Heteroskedastisitas

Kemudian Gujarati (2006) menyatakan bahwa untuk mendeteksi asumsi Heteroskedastisitas dapat menggunakan metode White Test. Ketentuan pengujian sebagai berikut: Apabila probability $< \alpha$ (0.05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model ditolak. Apabila probability $> \alpha$ (0.05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model tidak dapat ditolak.

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.866303	Prob. F(20,3)	0.3369
Obs*R-squared	22.21455	Prob. Chi-Square(20)	0.3290
Scaled explained SS	11.22878	Prob. Chi-Square(20)	0.9401

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2022

Berdasarkan output White Test tabel diatas terlihat bahwa probability Chi-Square (0.3290) $> \alpha$ (0.05), maka dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat diterima, berarti model dalam riset ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dalam riset ini menggunakan uji DW test dengan cara membandingkan DW hitung dengan DW table dengan tingkat signifikan 5 persen, seperti *table* dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi (DW)

R-squared	0.880580	Mean dependent var	0.362792
-----------	----------	--------------------	----------

Adjusted R-squared	0.855438	S.D. dependent var	0.050955
S.E. of regression	0.019374	Akaike info criterion	-4.866737
Sum squared resid	0.007132	Schwarz criterion	-4.621310
Log likelihood	63.40085	Hannan-Quinn criter.	-4.801625
Durbin-Watson stat	1.983732		

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2022

Dari hasil pengolahan data dengan $N = 25$, $k = 6$ maka $dL = 0.9272$ dan $dU = 1.8116$, $4 - dU = 2.1884$ dan $4 - dL = 3.0728$, nilai DW hitung sebesar 1.983732 yang berarti berada diantara dU dan $4 - dU$, jadi dapat disimpulkan bahwa model dalam riset ini tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi.

Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: KP

Method: Least Squares

Date: 12/25/22 Time: 13:39

Sample: 1997 2021

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.264738	0.065542	-4.039200	0.0008
PMA	5.21E-06	8.46E-07	6.161871	0.0000
IPK	1.232178	0.139885	8.808512	0.0000
KM	4.59E-06	9.34E-07	4.919475	0.0001
PG	1.59E-05	2.89E-06	5.477591	0.0000
UMP	-9.58E-08	1.07E-08	-8.939312	0.0000

R-squared	0.937358	Mean dependent var	0.362792
Adjusted R-squared	0.919957	S.D. dependent var	0.050955
S.E. of regression	0.014416	Akaike info criterion	-5.428619
Sum squared resid	0.003741	Schwarz criterion	-5.134105
Log likelihood	71.14343	Hannan-Quinn criter.	-5.350484
F-statistic	53.86945	Durbin-Watson stat	2.987443
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil olahan data di atas, model regresi linear berganda dengan tidak mentransformasikan kedalam bentuk logaritma berdasarkan tabel 6:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \epsilon$$

$$Y = - 0.264738 + 5.21E-06 PMA + 1.232178 IPK + 4.59E-06 KM + 1.59E-05 PG - 9.58E-08 UMP$$

$$Uji t = (-4.039200) \quad (6.161871) \quad (8.808512) \quad (4.919475) \quad (5.477591) \quad (-8.939312)$$

Uji $R^2 = 0.937358$

Uji F-statistic = 53.86945

Uji Prob(F-statistic) = 0.000000

Berdasarkan hasil estimasi persamaan regresi linear berganda dapat disimpulkan:

Hasil estimasi persamaan regresi linear berganda diperoleh konstanta sebesar - 0.264738. Jika variabel independen penanaman modal asing (X1), indeks persepsi korupsi (X2), kemiskinan (X3), pengangguran (X4) dan upah minimum provinsi (X5) di anggap tetap maka ketimpangan pendapatan Indonesia turun sebesar - 0.264738. Hasil estimasi persamaan regresi menghasilkan nilai koefisien dari penanaman modal asing (X1) 5.21E-06. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia di mana jika penanaman modal asing naik sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan di Indonesia naik sebesar 5.21E-06 persen. Hasil estimasi persamaan regresi menghasilkan nilai koefisien dari indeks persepsi korupsi (X2) 1.232178. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa indeks persepsi korupsi berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dimana jika indeks persepsi korupsi naik sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan naik sebesar 1.232178 persen.

Hasil estimasi persamaan regresi menghasilkan nilai koefisien dari kemiskinan (X3) 4.59E-06. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dimana jika kemiskinan naik sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan naik sebesar 4.59E-06 persen. (5) Hasil estimasi persamaan regresi menghasilkan nilai koefisien dari pengangguran (X4) 1.59E-05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangguran berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dimana jika pengangguran naik sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan naik sebesar 1.59E-05 persen. (6) Hasil estimasi persamaan regresi menghasilkan nilai koefisien dari upah minimum provinsi (X5) - 9.58E-08. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa upah minimum provinsi berhubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dimana jika upah minimum provinsi naik sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan turun sebesar - 9.58E-08 persen.

Uji Konsistensi Teori

Uji konsistensi teori dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas sudah sesuai dengan teori yang ada. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa:

Penanaman Modal Asing memiliki hubungan yang negative dengan ketimpangan pendapatan. Jika penanaman modal asing naik maka ketimpangan pendapatan turun, dan sebaliknya jika penanaman modal asing turun maka ketimpangan pendapatan akan naik. Hasil riset ini ditemukan bahwa penanaman modal asing berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan, maka hal ini tidak sesuai dengan teori yaitu jika penanaman modal asing naik maka ketimpangan pendapatan juga akan naik, begitu juga sebaliknya.

Riset ini menemukan bahwa arus masuk penanaman modal asing yang lebih signifikan mengarah pada ketimpangan dalam jangka pendek. Akan tetapi dampak penanaman modal asing pada pemerataan pendapatan menguntungkan bagi distribusi pendapatan dalam jangka panjang, “peningkatan modal manusia (*Human Development Index*) dapat membantu menciptakan efek inklusif (kesejahteraan) dari liberalisasi investasi (FDI) di Indonesia (Muryani et al., 2021)”. FDI mungkin berbahaya bagi distribusi pendapatan negara tuan rumah dengan tingkat kapasitas penyerapan yang rendah. Sebaliknya, hasil riset ini mendukung perspektif bahwa “FDI memiliki pengaruh yang kecil terhadap ketimpangan pendapatan dalam kasus negara-negara dengan daya serap yang lebih baik (Wu & Hsu, 2012)”.

Indeks persepsi korupsi memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Jika indeks persepsi korupsi naik maka ketimpangan pendapatan turun, dan sebaliknya jika indeks persepsi korupsi turun maka ketimpangan pendapatan naik. Hasil riset

ini menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan, maka hal ini tidak sesuai dengan teori “jika indeks persepsi korupsi naik maka ketimpangan pendapatan akan naik begitu juga sebaliknya”. Namun hasil riset ini sejalan (Apergis et al,2010) menemukan “bahwa dalam jangka panjang korupsi berdampak positif dan signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan”, halnya dengan hasil riset (Policardo et al,2019)”, bahwa korupsi berdampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan”.

Kemiskinan memiliki hubungan yang positif terhadap ketimpangan pendapatan. Jika tingkat kemiskinan naik maka ketimpangan pendapatan juga ikut naik, dan sebaliknya jika kemiskinan turun maka ketimpangan pendapatan juga turun. Sedangkan hasil riset ini menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan, maka hal ini sesuai dengan teori yaitu jika kemiskinan naik maka ketimpangan pendapatan akan juga ikut naik begitu juga sebaliknya. Hasil riset ini sejalan dengan riset (Andiny&Mandasari,2017) dimana hasil temuannya ada hubungan positif antara kemiskinan dengan kesenjangan, baik yang sifatnya spesial maupun inter-personal. Lebih lanjut dinyatakan hubungan ini lebih kuat antara kesenjangan antar individu (interpersonal) dengan kemiskinan dibandingkan dengan kesenjangan spesial.

Pengangguran memiliki hubungan yang positif terhadap ketimpangan pendapatan. Jika pengangguran naik maka ketimpangan pendapatan akan naik, dan sebaliknya jika pengangguran turun maka ketimpangan pendapatan akan turun. Sedangkan hasil riset ini menunjukkan bahwa pengangguran berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan, maka hal ini sesuai dengan teori yaitu jika pengangguran naik maka ketimpangan pendapatan naik begitu juga sebaliknya. Sejalan dengan riset (Apergis et al., 2011) menemukan “bahwa dalam jangka pendek pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan”. Hasil riset ini juga sejalan dengan riset (Cysne & Turchick, 2012) dimana hasil risetnya menemukan “bahwa terdapat hubungan positif antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan”.

Secara teori “upah minimum provinsi memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Jika upah minimum provinsi naik maka ketimpangan pendapatan akan turun, sebaliknya jika upah minimum provinsi turun maka ketimpangan pendapatan akan naik”. Hasil riset ini sejalan dengan teori bahwa upah minimum provinsi naik maka ketimpangan pendapatan akan turun begitu juga sebaliknya. Hasil riset ini sejalan dengan hasil riset (Anshari et al,2019) di mana kenaikan upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, kenaikan upah dapat meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat yang dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa di suatu daerah yang akan membuat ketimpangan menjadi lebih rendah antara daerah lain ketika perekonomian daerah cenderung membaik”. Hasil riset ini juga sejalan dengan riset (Riandi & Varlitya, 2020) yang menemukan bahwa “Upah Minimum Provinsi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan”.

Hasil Pengujian Statistik (Uji R²)

Variasi naik turunnya ketimpangan pendapatan 93% dipengaruhi oleh variabel penanaman modal asing (X1), indeks persepsi korupsi (X2), kemiskinan(X3), pengangguran (X4), dan upah minimum provinsi (X5) sedangkan 7% lagi dijelaskan oleh faktor – faktor lain di luar model riset ini.

Hasil pengujian hipotesa (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian, penanaman modal asing (X1) mempunyai Probability < alpha yaitu 0.0000, maka Ho ditolak dan Ha diterima terdapat pengaruh yang signifikan antara penanaman modal asing dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil pengujian, indeks persepsi korupsi (X2) mempunyai probability <

alpha yaitu 0.0000, maka H_0 ditolak dan H_a terima, terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks persepsi korupsi dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil pengujian, kemiskinan (X3) mempunyai probability $<$ alpha yaitu 0.0001, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil pengujian, pengangguran (X4) mempunyai Probability $<$ alpha yaitu 0.0000, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pengangguran dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil pengujian, upah minimum provinsi (X5) mempunyai Probability $<$ alpha yaitu 0.0000, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ada pengaruh yang signifikan antara upah minimum provinsi dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat kepercayaan 95%.

Uji F

Nilai probability (F-statistik) sebesar 0.000000 akan dibandingkan dengan alpha 5 persen. Dimana nilai probability $0.000000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan variabel penanaman modal asing (X1), indeks persepsi korupsi (X2), kemiskinan (X3), pengangguran (X4) dan upah minimum (X5) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat kepercayaan 95%.

SIMPULAN

Untuk Variabel Penanaman Modal Asing (X1) terdapat hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan apabila terjadi kenaikan 1 persen pada penanaman modal asing maka ketimpangan pendapatan akan naik sebesar $5.21E-06$ persen. Indeks Persepsi korupsi terdapat pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif antara indeks persepsi korupsi dengan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan apabila terjadi kenaikan 1 persen dalam indeks persepsi korupsi maka ketimpangan pendapatan akan naik sebesar 1.232178 persen. Kemiskinan terdapat pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif antara kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan apabila terjadi kenaikan 1 persen pada maka tingkat kemiskinan maka ketimpangan pendapatan akan naik sebesar $4.59E-06$ persen. Pengangguran terdapat pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif antara pengangguran dengan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan apabila terjadi kenaikan 1 persen tingkat pengangguran maka ketimpangan pendapatan akan naik sebesar $1.59E-05$ persen. Upah Minimum terdapat pengaruh yang signifikan dan berhubungan negatif antara upah minimum dengan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan apabila terjadi kenaikan 1 persen dalam tingkat upah minimum akan menyebabkan turunnya ketimpangan pendapatan sebesar $-9.58E-08$ persen.

SARAN

Pemerintah diharapkan mampu memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia melalui berbagai kebijakan diantaranya peningkatan peran FDI dalam penciptaan lapangan kerja baru serta penetapan standar upah minimum yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak bagi pekerja sehingga dapat meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat memperkecil ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.

- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). "Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>.
- Apergis, N., Dincer, O. C., & Payne, J. E. (2010). The relationship between corruption and income inequality in U.S. states: Evidence from a panel cointegration and error correction model. *Public Choice*, 145(1), 125–135. <https://doi.org/10.1007/s11127-009-9557-1>.
- Apergis, N., Dincer, O., & Payne, J. E. (2011). On the dynamics of poverty and income inequality in US states. *Journal of Economic Studies*, 38(2), 132–143. <https://doi.org/10.1108/01443581111128370>.
- Cysne, R. P., & Turchick, D. (2012). Equilibrium unemployment-inequality correlation. *Journal of Macroeconomics*, 34(2), 454–469. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2011.12.009>.
- Dias Widya Ningtyas. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Upah Minimum Regional, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1997-2014. In *Universitas Sanata Dharma*.
- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-terme, R. (2002). *Does corruption affect income inequality and poverty ?* 23–45.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di desa palopat maria kecamatan padangsidempuan hutaimbaru. *Ihtiyath*, 2(2), 255–270.
- Muryani, Esquivias, M. A., Sethi, N., & Iswanti, H. (2021). Dynamics of Income Inequality, Investment, and Unemployment in Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, 29, 660–678. <https://doi.org/10.25133/JPSSv292021.040>.
- Policardo, L., Sanchez Carrera, E. J., & Risso, W. A. (2019). Causality between income inequality and corruption in OECD countries. *World Development Perspectives*, 14(April 2018), 1–3. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2019.02.013>.
- Pourfaraj, A., Mehregan, N., Potanlar, S. K., & Eskandariata, M. R. (2019). Regional inequality in Iran and the impact of economic factors: A spatial econometric approach. *Iranian Economic Review*, 23(2), 297–319. <https://doi.org/10.22059/ier.2019.70279>.
- Riandi, M., & Varlitya, C. R. (2020). Pengaruh Kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Indonesia. *Jurnal Ekombis*, 6(1), 57–68. <http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/2008>.
- Sari Nurmalisa Sungkar; dkk. (2015). Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(2), 40–53.
- Wu, J. Y., & Hsu, C. C. (2012). Foreign direct investment and income inequality: Does the relationship vary with absorptive capacity? *Economic Modelling*, 29(6), 2183–2189. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.06.013>.
- Zaidun, M. (2008). *Paradigma baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan*. 38. [http://repository.unair.ac.id/30814/1/PG.160-10 Zai p.pdf](http://repository.unair.ac.id/30814/1/PG.160-10%20Zai%20p.pdf).